



BAWASLU KOTA YOGYA TERBITKAN IMBAUAN BAGI ASN

Pilkada Rentan Terjadi Pelanggaran Netralitas

YOGYA (KR) - Dinamika Pilkada Kota Yogya diprediksi akan mulai meningkat pada bulan depan atau mendekati pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota. Seperti gelaran sebelumnya, ajang Pilkada rentan menimbulkan terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga penggunaan fasilitas negara.

Sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap netralitas, Bawaslu Kota Yogya jauh hari juga sudah menerbitkan imbauan secara khusus. Melalui surat imbauan nomor S.233/PM.00.02/K.YO-05/06/2024, baik ASN maupun pejabat lainnya diingatkan kembali pakta integritas terkait pemilu yang sudah disepakati.

"Tujuan dari surat imbauan ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri di wilayah Kota Yogya," ujar Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Yogya Siti Nurhayati, Minggu (23/6).

Dalam imbauan itu ditegaskan bahwa pegawai ASN, anggota TNI dan Polri di wilayah Kota Yogya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai

politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan para kandidat. Tindakan itu baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogya.

Selain itu khusus bagi pejabat negara atau pejabat lainnya diimbau agar tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah untuk kepentingan pasangan calon. Justru seorang pejabat harus turut serta secara aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas.

"Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dan sebagai bagian dari ketugasan Bawaslu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu, maka kami berkewajiban untuk mengimbau segenap pemangku kepentingan khususnya ASN, TNI dan Polri serta pejabat negara dan pejabat lainnya di wilayah Kota Yogya untuk menjaga netralitas," tandas Nurhayati.

Berkaca pada pengalaman Pilkada di Kota Yogya yang pernah bergulir sebelumnya, netralitas ASN sempat menjadi persoalan. Bahkan sampai diungkit dalam proses persidangan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelanggaran netralitas ASN sangat rentan terjadi manakala ada oknum yang 'cari muka' dengan berupaya turut memenangkan salah satu pasangan calon. Dengan harapan kelak ketika calon tersebut berhasil terpilih dan dilantik sebagai kepala daerah maka bakal diganjar dengan jabatan strategis di lingkungan pemerintah.

Begitu pula dengan penggunaan fasilitas negara yang hanya tidak sebatas fisik seperti armada maupun aset pemerintah melainkan juga program kegiatan. Terutama berupa program tertentu yang dibiayai oleh anggaran negara namun dikamuflekan dan ditunggangi untuk kepentingan calon. Oleh karena itu Bawaslu Kota Yogya memiliki tugas berat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada.

Sementara itu, berdasarkan tahapan dan jadwal Pilkada Kota Yogya 2024, pengumuman pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol akan dimulai pada 24 Agustus 2024. Selanjutnya tahapan paling krusial berupa pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005